

Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Shavira Aulia Safitri¹, Susi Hardjati²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur
21041010060@student.upnjatim.ac.id¹, susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The delegation of authority that was originally handled by the central government and then transferred to the local government resulted in an increase in the authority of the local government when regional autonomy was implemented. Among these authorities is the management of regional property. The government has issued a number of regulations relating to the management of regional property to improve the way state or regional property is managed to facilitate the realization of good governance in the implementation of regional autonomy. The General Section is a government organization under the auspices of the General Administration Section of the Regional Secretariat of Jombang Regency. Its duties include assisting the General Administration Assistant in planning work programs, organizing and repairing household goods, and organizing leadership and regional equipment arrangement programs. Most of the assets owned and supervised by the General Section are assets used to support significant operational activities in other Regional Apparatus Organizations (OPD). Knowing how well asset management in the General and Regional Assets Section of the Regional Secretariat of Jombang Regency is the purpose of this research. Documentation is the data collection method used in this study. The analysis of this study used an effectiveness scale and descriptive statistics. Planning and budgeting for the needs, purchases, and use of the General Section are the results of this study, and are carried out administratively in accordance with applicable laws. However, from the results of the analysis, asset management in the General Section is still not effective.

Keywords : *Regional Property, Regional Assets, Asset Management, Basic Principles of Regional Asset Management.*

ABSTRAK

Pembentukan delegasi urusan (otoritas), yang pertama kali ditangani oleh pemerintah pusat dan kemudian dipindahkan ke pemerintah daerah, menghasilkan peningkatan otoritas atau kewenangan pemerintah daerah ketika otonomi daerah dilaksanakan. Di antara kewenangan ini adalah pengelolaan barang (aset) milik daerah. Pemerintah telah merilis sejumlah aturan yang berkaitan dengan tata pengelolaan barang milik daerah dalam upaya meningkatkan cara di mana negara atau pengelolaan barang milik daerah dikelola untuk memfasilitasi realisasi tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bagian Umum merupakan salah satu organisasi pemerintah yang berada di bawah naungan Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Tugasnya antara lain membantu Asisten Administrasi Umum dalam perencanaan program kerja, mengatur dan memperbaiki barang-barang rumah tangga, serta menyelenggarakan program penataan perlengkapan untuk pimpinan dan wilayah. Sebagian besar aset yang dimiliki dan diawasi oleh Bagian Umum ialah aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang signifikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Mengetahui seberapa baik pengelolaan aset di Bagian Umum dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan tujuan dari penelitian ini. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis studi ini menggunakan skala efektivitas dan statistik deskriptif. Perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan, pembelian, dan penggunaan Bagian Umum merupakan hasil dari penelitian ini, dan dilakukan secara administratif sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dari hasil analisis pengelolaan aset pada Bagian Umum masih belum efektif.

Kata kunci : Barang Milik Daerah, Aset Daerah, Manajemen Aset, Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah.

PENDAHULUAN

Pembentukan delegasi urusan (otoritas), yang pertama kali ditangani oleh pemerintah pusat dan kemudian dipindahkan ke pemerintah daerah, menghasilkan peningkatan otoritas pemerintah daerah ketika otonomi daerah dilaksanakan. Di antara kewenangan ini adalah pengelolaan barang (aset) milik daerah. Manajemen aset pemerintah daerah yang semakin efisien dipengaruhi oleh otoritas ini. Selain itu, kekuatan ini memberikan pemerintah daerah lebih otonomi dalam pengelolaan aset daerah serta mengawasi sumber daya lokal. (Entjaurau & Gelatan, 2023)

Pemerintah telah merilis sejumlah aturan yang berkaitan dengan tata pengelolaan barang milik daerah dalam upaya meningkatkan cara di mana negara atau pengelolaan barang milik daerah dikelola untuk memfasilitasi realisasi tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Antara Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis untuk mengelola Barang Milik Daerah dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Kadir, 2015)

Bagian Umum merupakan salah satu organisasi pemerintah yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan administrasi umum. Salah satu tanggung jawabnya adalah membantu Asisten Administrasi Umum dalam membuat jadwal program kerja, memperoleh pimpinan perangkat dan perlengkapan daerah, serta membuat rencana pengorganisasian rumah tangga dan menyusun perencanaan program penataan.

Aset yang dimiliki dan diawasi oleh instansi tersebut sebagian besar merupakan aset yang disimpan untuk memperlancar operasional penting di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Sub Bagian Rumah Tangga yang merupakan bagian dari satuan kerja Bagian Umum dan Perlengkapan bertugas melakukan pengelolaan perbekalan dan perlengkapan pada gedung perkantoran di lingkungan kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Jombang. Hal ini mencakup hal-hal seperti Ac, lift, lampu, cctv, serta ketersediaan listrik dan air. Selain itu juga terdapat wireless, papan nama instansi, mesin absensi, dan peralatan lainnya yang berada dalam kewenangan Bagian Umum yang diberikan oleh Subbagian Perlengkapan. Oleh karena itu, setiap tugas yang menjadi

tanggung jawab Bagian Umum pada akhirnya akan mempengaruhi keselamatan, kenyamanan, dan penyelenggaraan urusan di OPD lainnya. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah Bagian Umum sangat menentukan kinerja dan pelayanan OPD lainnya. Secara praktis, rangkaian pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum mengikuti pola yang sama dengan OPD lainnya, perencanaan, penganggaran, pembelian, penggunaan, dan administrasi kebutuhan harus diutamakan.

Berdasarkan penjelasan dalam Ringkasan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2012 hingga 2015, masih banyak permasalahan dalam penatausahaan aset, sehingga pengelolaan aset bukanlah suatu hal yang mudah. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemda masih mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya secara tidak proporsional atau tidak wajar. Penggunaan aset daerah pada Bagian Umum menghadirkan tantangan pengelolaan yang dapat berdampak pada operasional penatausahaan aset tersebut. Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam penanganan barang (aset) milik daerah adalah ketidakteraturan dan ketidakakuratan dalam proses pengelolaan aset pada label kode barang, tidak lengkapnya berita acara pemegang barang, dan tidak tersedianya kartu inventarisasi tata ruang. Permasalahan tersebut menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola aset yang dimilikinya, yang seringkali tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Tabel 1 Kegiatan Pengadaan Aset Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022

Sumber : Data Diolah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

No	Uraian	Kegiatan
1	Belanja Tanah	Pengadaan Tanah
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1. Pengadaan Kendaraan 2. Pengada an Meubeliar 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Belanja Bangunan dan Gedung	Pengadaan Gedung

Terlihat jelas dari bagan di atas bahwa halaman kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Jombang sebagian untuk penimbunan dengan menggunakan uraian belanja modal tanah. Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk pembelian perlengkapan kantor seperti kamera digital, laptop, lensa kamera, pengeras suara, mikrofon, dan lain-

lain untuk keperluan Bagian Umum. Selain itu juga untuk pembelian perabot kantor, seperti meja, sofa, kursi rapat, Gucci, dan perlengkapan lainnya, serta pembelian perlengkapan gedung kantor seperti genset, mesin air, dan kabel listrik. Pengadaan untuk biaya gedung dan bangunan digunakan untuk membuat taman-taman di dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Jombang, yang kemudian diawasi oleh Bagian Umum.

Bagian Umum Sekretariat Daerah harus memanfaatkan secara maksimal kepemilikan aset daerah. Pengguna aset yang mencakup berbagai komponen pemerintah daerah harus diawasi secara ketat untuk memastikan sumber daya digunakan secara baik, efisien, dan bijaksana untuk meningkatkan taraf pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Untuk mempertahankan nilai aset dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan memajukan layanan kantor, aset yang efektif sangat penting. Peneliti termotivasi untuk membahas, menelaah, dan mengevaluasi berbagai keadaan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas dengan membuat penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang."

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif merupakan alat yang berguna untuk menyajikan, mengkarakterisasi, menganalisis, dan menjelaskan data dalam bentuk tabel, gambar, dan diagram agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Efektivitas pengelolaan aset di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang diteliti oleh peneliti dengan menggunakan metodologi deskriptif. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menjadi lokasi penelitian ini. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik instansi tersebut dalam mengelola aset daerah.

Data dan Sumber Data

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan realisasi anggaran menjadi data kuantitatif dalam penelitian ini, serta Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menjadi sumber informasi utama dalam studi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dan informasi untuk suatu proyek studi, termasuk informasi yang dapat mendukung proyek tersebut, baik berupa buku, laporan-laporan, arsip, atau bahan terkait lainnya, dikenal dengan istilah dokumentasi.

Instrumen Penelitian

a. Instrumen Pengumpulan Data

Daftar periksa atau lembar dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

b. Instrumen Analisis Data

Data disajikan dalam statistik deskriptif ini dengan menggunakan skala efektivitas dan distribusi frekuensi. Rumus untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dimana:

R = Realisasi

T = Target

Tabel 2 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Sumber : Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

A. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memeriksa dan menilai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah dibuat oleh Bagian Umum sebagai hasil dari pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran. Setiap kegiatan RKA akan dituangkan secara menyeluruh dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah melalui proses evaluasi. Bagian Umum akan menggunakan DPA ini sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan pengadaan aset.

B. Pengadaan

Proses pengadaan barang dan jasa daerah dikenal dengan istilah pengadaan. Pembelian mesin dan peralatan, aset tetap lainnya, serta gedung dan bangunan merupakan kegiatan pengadaan yang berada di bawah lingkup Bagian Umum. Dalam rangka mendukung kegiatan operasional di instansi ini, jangkauan Sekretariat Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Jombang, pengadaan barang, mesin, dan aset tetap lainnya dilakukan.

Meskipun dihibahkan kepada kelompok lain, tanah, bangunan, dan bangunan lainnya dibeli dan didanai oleh Bagian Umum.

C. Penggunaan

Penggunaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna atau pengguna yang diberi kuasa untuk memenuhi tanggung jawab utama pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah. Pegawai Bagian Umum, Sekretariat, dan OPD lain yang berada di bawah naungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jombang akan menggunakan aset yang telah diadakan oleh Bagian Umum.

A) Analisis Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Data anggaran dan realisasi belanja pada organisasi perangkat daerah (OPD) pada instansi ini diperoleh berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Sejumlah anggaran telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum yang akan digunakan untuk melaksanakan Belanja Modal (aset) pada tahun 2022. Tabel 3 menampilkan Anggaran Belanja Modal Bagian Umum Kabupaten Jombang.

Tabel 3 Nilai Anggaran Pada DPA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran DPA Perubahan
1.	Belanja Tanah	Rp. 3.600.000.000
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 2.232.687.900
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 1.280.259.800
	Belanja Modal	Rp. 7.112.947.700

Pemerintah Kabupaten Jombang menganggarkan Rp 7.112.947.700 untuk kebutuhan belanja modal pada OPD Umum dan Perlengkapan selama tahun 2022, sesuai dengan statistik yang ditunjukkan pada tabel di atas. Berdasarkan data di atas, anggaran tertinggi diperuntukkan untuk kegiatan belanja tanah, dan biaya anggaran terkecil diperuntukkan untuk kegiatan belanja gedung dan bangunan.

B) Analisis Pengadaan

Data realisasi anggaran yang digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan, pembelian tanah, dan pembelian gedung dan bangunan juga diperoleh selain data anggaran belanja. Tabel 4 menampilkan data realisasi anggaran Bagian Umum untuk tahun 2022.

Tabel 4 Pengadaan Aset Bagian Umum

Sumber : Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022)

No.	Nama Barang	Nilai Barang	Keterangan
-----	-------------	--------------	------------

1	A.C. Split	Rp	31.815.000	Pengadaan Peralatan Gedung
2	Alat Kantor Lainnya	Rp	36.150.000	Pengadaan Peralatan Gedung
3	Alat Kantor Lainnya	Rp	49.050.000	Pengadaan Peralatan Gedung
4	Alat Penghancur Kertas	Rp	60.800.000	Pengadaan Peralatan Gedung
5	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp	39.999.000	Pengadaan Peralatan Gedung
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Rp	243.139.768	Belanja Gedung
7	Bracket Standing Peralatan	Rp	3.600.000	Pengadaan Peralatan Gedung
8	Cable	Rp	15.250.000	Pengadaan Peralatan Gedung
9	Camera Digital	Rp	65.399.000	Pengadaan Peralatan Gedung
10	Coffee Maker	Rp	1.990.000	Pengadaan Peralatan Gedung
11	Dispenser	Rp	17.250.000	Pengadaan Peralatan Gedung
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	Rp	245.836.719	Belanja Gedung
13	Gucci	Rp	5.100.000	Pengadaan Meubeliar
14	Kursi Besi/Metal	Rp	49.999.000	Pengadaan Meubeliar
15	Kursi Biasa	Rp	14.500.000	Pengadaan Meubeliar
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Rp	24.000.000	Pengadaan Meubeliar
17	Kursi Rapat	Rp	198.400.000	Pengadaan Meubeliar
18	Lap Top	Rp	206.155.000	Pengadaan Peralatan Gedung
19	Lensa Kamera	Rp	111.939.000	Pengadaan Peralatan Gedung
20	Loudspeaker	Rp	51.258.000	Pengadaan Peralatan Gedung
21	Meubeleur lainnya	Rp	90.059.000	Pengadaan Meubeliar

22	Microphone	Rp	25.750.000	Pengadaan Peralatan Gedung
23	P.C Unit	Rp	299.075.000	Pengadaan Peralatan Gedung
24	Pagar Permanen	Rp	187.284.895	Pengadaan Peralatan Gedung
25	PC Workstation	Rp	45.549.000	Pengadaan Peralatan Gedung
26	Pompa Air	Rp	21.780.000	Pengadaan Peralatan Gedung
27	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Rp	147.380.000	Pengadaan Peralatan Gedung
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rp	90.533.000	Pengadaan Peralatan Gedung
29	Sketsel	Rp	156.640.000	Pengadaan Meubeliar
30	Sofa	Rp	76.920.000	Pengadaan Meubeliar
31	Sound System	Rp	106.760.000	Pengadaan Peralatan Gedung
32	Speaker Komputer	Rp	4.080.000	Pengadaan Peralatan Gedung
33	Taman Permanen	Rp	581.748.181	Belanja Gedung
34	Tablet PC	Rp	46.997.000	Pengadaan Peralatan Gedung
35	Sumersible Pump	Rp	14.750.000	Pengadaan Peralatan Gedung
36	Televisi	Rp	76.600.000	Pengadaan Peralatan Gedung
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Rp	3.054.200.000	Pengadaan Tanah
Jumlah		Rp	6.497.736.563	

Informasi mengenai realisasi anggaran belanja yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2022 digunakan untuk membeli perabot, perlengkapan bangunan, tanah, dan konstruksi. Jumlah keseluruhan yang dialokasikan untuk pengadaan aset adalah sebesar Rp6.497.736.563, dimana Rp610.518.000 dibelanjakan untuk meubeliar, Rp1.575.009.000 dibelanjakan untuk perlengkapan gedung, Rp3.054.200.000 dibelanjakan untuk tanah dan Rp1.258.009.563 dibelanjakan untuk bangunan. Data ini

menunjukkan bahwa pembelian tanah, bangunan, dan peralatan bangunan merupakan mayoritas dari anggaran yang dialokasikan. Diketahui bahwa, jika dirata-ratakan, total biaya untuk membeli 37 produk pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 175.614.502.

Berikut disajikan data perbandingan anggaran dan realisasi anggaran Bagian Umum Kabupaten Jombang yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran

Sumber : Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022)

No	Uraian	Anggaran DPA Perubahan	Realisasi Anggaran
1.	Belanja Tanah	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.054.200.000
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 2.232.687.900	Rp. 2.185.527.000
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 1.280.259.800	Rp. 1.258.009.563
Belanja Modal		Rp. 7.112.947.700	Rp. 6.497.736.563

Berdasarkan informasi pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai total dari kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh instansi ini lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk kegiatan belanja modal tidak digunakan sepenuhnya, atau jumlah aktual yang dibelanjakan tidak sesuai dengan rencana awal.

C) Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pengadaan Aset

Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan realisasi anggaran pengadaan aset pada Bagian Umum Kabupaten Jombang berdasarkan data yang telah disajikan yaitu sebagai berikut :

(a) Efektivitas Belanja Aset

Instansi ini menganggarkan Rp 7.112.947.700 untuk belanja aset pada tahun 2022, namun jumlah aktual yang dibelanjakan untuk aset adalah Rp 6.497.736.563. Hal ini berarti bahwa rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan efektivitas belanja aset yaitu:

$$\text{Efektivitas Belanja Aset} = \frac{\text{Rp } 6.497.736.563}{\text{Rp } 7.112.947.700} \times 100 = 91,35\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Bagian Umum Kabupaten Jombang telah mencapai pengelolaan aset yang sangat efektif, atau 91,35% dari anggaran yang dialokasikan, dalam hal realisasi anggaran belanja aset.

(b) Efektivitas Belanja Tanah

Efektivitas belanja tanah dapat dinilai dari total belanja yang dianggarkan sebagai berikut: instansi ini menganggarkan Rp 3.600.000.000, untuk belanja tanah, namun yang terealisasi sebesar Rp 3.054.200.000, sehingga dapat diukur sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Belanja\ Tanah = \frac{Rp\ 3.054.200.000}{Rp\ 3.600.000.000} \times 100 = 84,84\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Bagian Umum Kabupaten Jombang telah mencapai pengelolaan aset pada tingkat yang dianggap sangat efektif, atau telah merealisasikan 84,84% dari anggaran yang dialokasikan untuk belanja tanah.

(c) Efektivitas Belanja Peralatan dan Mesin

Bagian Umum Kabupaten Jombang menganggarkan Rp 2.232.687.900 dari total anggaran belanja aset untuk peralatan dan mesin, namun yang benar-benar dibelanjakan sebesar Rp 2.185.527.000. Dengan demikian, dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Belanja\ Peralatan\ dan\ Mesin = \frac{Rp\ 2.185.527.000}{Rp\ 2.232.687.900} \times 100 = 97,89\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, Bagian Umum Kabupaten Jombang telah mencapai tingkat pencapaian manajemen aset sebesar 97,89% dari anggaran yang dialokasikan untuk pembelian mesin dan peralatan, yang mana hal ini termasuk dalam kategori sangat efektif.

(d) Efektivitas Belanja Bangunan dan Gedung

Bagian Umum Kabupaten Jombang mengalokasikan total anggaran sebesar Rp 1.280.259.800 untuk belanja aset, dimana Rp 1.258.009.563 di antaranya digunakan untuk belanja gedung dan bangunan. Oleh karena itu, dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Belanja\ Bangunan\ dan\ Gedung = \frac{Rp\ 1.258.009.563}{Rp\ 1.280.259.800} \times 100 = 98,26\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Bagian Umum Kabupaten Jombang telah mencapai tingkat pencapaian pengelolaan aset yang dianggap sangat efektif, atau telah merealisasikan 98,26% dari anggaran yang dialokasikan untuk belanja gedung dan bangunan.

Data mengenai efektivitas pengelolaan aset yang telah diperiksa ditabulasikan dan mencakup informasi berikut ini:

Tabel 6 Laporan Realisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022

Sumber : Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022)

No	Uraian	Anggaran DPA Perubahan (Target)	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
1.	Belanja Tanah	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.054.200.000	84,84%	Sangat Efektif

2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 2.232.687.900	Rp. 2.185.527.000	97,89%	Sangat Efektif
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 1.280.259.800	Rp. 1.258.009.563	98,26%	Sangat Efektif
	Belanja Modal	Rp. 7.112.947.700	Rp. 6.497.736.563	91,35%	Sangat Efektif

D) Analisis Penggunaan

Tabel 7 Laporan Penggunaan Barang Milik Daerah (Aset) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022

Sumber : Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022)

No.	Nama Barang	Pengguna Barang
1	A.C. Split	Bagian Umum
2	Alat Kantor Lainnya	Bagian Umum
3	Alat Kantor Lainnya	Bagian Umum
4	Alat Penghancur Kertas	Bagian Umum
5	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya)	Bagian Umum
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bagian Umum
7	Bracket Standing Peralatan	Bagian Umum
8	Cable	Bagian Umum
9	Camera Digital	Bagian Umum
10	Coffee Maker	Bagian Umum
11	Dispenser	Bagian Umum
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	Bagian Umum
13	Gucci	Bagian Umum
14	Kursi Besi/Metal	Bagian Umum
15	Kursi Biasa	Bagian Umum
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Bagian Umum
17	Kursi Rapat	Bagian Umum
18	Lap Top	Bagian Umum
19	Lensa Kamera	Bagian Umum
20	Loudspeaker	Bagian Umum
21	Meubeleur lainnya	Bagian Umum
22	Microphone	Bagian Umum

23	P.C Unit	Bagian Umum
24	Pagar Permanen	Bagian Umum
25	PC Workstation	Bagian Umum
26	Pompa Air	Bagian Umum
27	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Bagian Umum
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Bagian Umum
29	Sketsel	Bagian Umum
30	Sofa	Bagian Umum
31	Sound System	Bagian Umum
32	Speaker Komputer	Bagian Umum
33	Taman Permanen	Bagian Umum
34	Tablet PC	Bagian Umum
35	Sumersible Pump	Bagian Umum
36	Televisi	Bagian Umum
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Dihibahkan

Pada tahun-tahun sebelumnya terdapat fenomena yaitu ketidakteraturan dan ketidakakuratan dalam proses pengelolaan aset pada label kode barang, tidak lengkapnya berita acara pemegang barang, dan tidak tersedianya kartu inventarisasi tata ruang. Tindakan ini kemudian akan merugikan/membingungkan bagian aset sebab akan terjadi kehilangan barang pakai yang tidak ada label kode barang yang kemudian harus dilakukan pengadaan baru.

Ditemukan bahwa produk tertentu yang telah dibeli pada tahun 2022 masih digunakan oleh Bagian Umum pada tahun 2023, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 7 di atas. Dengan demikian, fenomena pada label kode barang adalah salah satu fenomena yang disebutkan sebelumnya tidak terbukti pada penelitian ini. Karena dapat digu nakan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung tanggung jawab administratif Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, maka aset yang dimiliki menjadi efektif dalam penggunaannya. Namun, masih ada masalah dengan berita acara pemegang barang dan kartu inventaris ruangan yang hilang.

Secara keseluruhan, terbukti bahwa pengelolaan aset di Bagian Umum dinilai sangat efektif berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan porsi anggaran yang telah ditetapkan yang terealisasi. Berdasarkan laporan realisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2022, belanja gedung, mesin, dan peralatan dinilai sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi kedua kegiatan tersebut hampir mencapai target 100%. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, termasuk masalah cuaca, biaya pembangunan yang lebih rendah, dan biaya pengadaan

yang lebih murah daripada yang dianggarkan untuk kebutuhan yang diuraikan dalam DPA. Dengan realisasi yang hampir mencapai 100%, belanja tanah dianggap sangat efektif untuk sementara ini. Berdasarkan laporan realisasi belanja tanah, realisasi belanja tanah mencapai 84,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut tidak mencapai target 100% karena perlunya perencanaan yang matang.

Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa anggaran pengelolaan aset yang direalisasikan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2022 akan sangat efektif karena anggaran tersebut direncanakan dengan matang, estimasi harga sendiri ditentukan dengan menggunakan data survei pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat kekurangan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) atau kurangnya pengetahuan terkait tanggung jawab dan peran pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang dan jasa karena masih terdapat permasalahan yaitu ketidakteraturan dan ketidakakuratan dalam proses pengelolaan aset pada label kode barang, berita acara pemegang barang kurang lengkap karena banyaknya jumlah barang yang dikelola oleh Bagian Umum hal ini menyebabkan proses administrasi yang kurang lengkap salah satunya yaitu beberapa pemegang barang yang secara administrasi belum dilengkapi dengan pakta integritas sehingga berita acara pemegang barang tidak tersusun secara lengkap, kartu inventaris keruangan belum tersedia karena banyaknya jumlah barang yang dikelola oleh Bagian Umum dan intensitas mutasi yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kartu inventaris keruangan tidak terupdate sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Dalam hal ini jika permasalahan tersebut akan terjadi lagi maka hal yang harus dilakukan yaitu dapat diidentifikasi barang yang kode labelnya hilang dapat dicocokkan dengan data barang milik daerah tersebut yang telah di entry di aplikasi SIMDA BMD dan label barang dapat dicetak kembali, dilengkapinya berita acara pemegang barang dengan dilengkapi pakta integritas secara teliti dan teratur terhadap jumlah barang yang dikelola oleh Bagian Umum, serta diadakannya pembuatan kartu inventarisasi keruangan supaya tersusun secara optimal.

Meskipun secara resmi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, dan penggunaan aset di Bagian Umum belum berjalan dengan efektif, seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis pengelolaan aset yang dilakukan di Bagian Umum. Meskipun realisasi anggaran dalam pengelolaan aset dinilai sangat efektif. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah manajemen aset Bagian Umum berhasil mencapai tujuan. Catatan penting dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan aset-aset tersebut oleh pemerintah daerah merupakan indikator pengelolaan aset yang sangat baik dan efektif, yang melampaui pengukuran tujuan dan realisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya Bagian Umum, harus memperhatikan fakta bahwa pengelolaan aset

yang efektif dalam administrasi tidak selalu berhasil ke dalam praktik yang secara administrasi.

KESIMPULAN

Disebutkan bahwa manajemen aset di Bagian Umum sangat efektif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2023. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa manajemen aset pada instansi tersebut berhasil. Tingginya nilai realisasi anggaran pada tahun 2022 mengindikasikan keefektifan pengelolaan aset daerah. Meskipun realisasi anggaran dalam pengelolaan aset dinilai sangat efektif. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah manajemen aset Bagian Umum berhasil mencapai tujuan. Beberapa faktor, seperti berita acara pemegang barang yang tidak lengkap, kartu inventaris ruangan yang hilang, serta ketidakteraturan dan ketidaktepatan dalam pengelolaan aset pada label kode barang, menjadi penyebab utama. Hal ini disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat kurang dan jaranganya pengawasan dan peninjauan ulang oleh Bagian Umum.

SARAN

Saran untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di lingkungan Bagian Umum, Bagian Umum perlu mengoptimalkan pelaksanaan prosedur pengelolaan aset daerah dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan aset di Bagian Umum dan Perlengkapan dengan cara memperoleh atau mengikuti bimbingan teknis daerah tentang pengelolaan aset, mengadakan uji sertifikasi pembelian barang dan jasa, dll. Menggunakan komoditas (aset) lokal dengan lebih hati-hati; menginventarisir dan mendokumentasikan aset sebelum menggunakannya. Untuk mencegah penemuan di masa depan, aset yang rusak juga harus segera dilaporkan dan dicatat untuk menentukan nilai penyusutannya. Selain itu, pertimbangkan cara terbaik untuk mengelola, menjaga, dan melindungi sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, H., & MT, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets*, 6(1), 23–38.
- Ayomi, E. A., Kalangi, L., & Afand, D. (2022). Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Evaluation of Land Asset Administration in The General Section of The Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 687–692.

- Entjaurau, M. A., & Gelatan, L. (2023). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika Email: Stie@stiejb.ac.id*. 7(1), 47–67.
- Kadir, B. C. dan A. (2015). Peranan Tata Usaha Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dalam Meningkatkan Pelayanan. *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal of Governance and Political Social Uma)*, 3(1), 14–24. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/907>
- Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015). Analysis of Budgeting for Earning, Financial and Local Asset Management Department of Kotamobagu City Budget Year 2014. *Jurnal EMBA*, 3(1), 841–848.
- Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 211–221. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 43–52. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>
- Putri, M. W., & Mutiah, N. (2021). PENGUKURAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN OPEN DATA SYSTEM MENGGUNAKAN MODEL DELONE AND MCLEAN (Studi Kasus : Open Data System Pemerintah Kota Pontianak). *Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 09(01), 12–22.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah , kabupaten lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang*, 3(1), 111–117.
- RAHMAN, A. K. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU. *Global Health*, 167(1), 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Sihombing, V., & Yanris, G. J. (2020). Penerapan Aplikasi Dalam Mengolah Aset Desa (Studi Kasus : Kepenghuluan Sri Kayangan) 1). *Terakreditasi DIKTI*, 4(1), 12–15.
- Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 74–97. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>.